

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Jawa Tengah

# Minimalkan Penyimpangan, Pengelolaan Dana Desa Diminta Gunakan "Sikudes"

<http://www.antarajateng.com/detail/minimalkan-penyimpangan-pengelolaan-dana-desa-diminta-gunakan-sikudes.html>

Pewarta : Wisnu Adhi N.

Semarang, ANTARA JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan para kepala desa menggunakan sistem keuangan desa (Sikudes) untuk meminimalkan penyimpangan saat penggunaannya.

"Penggunaan Sikudes dalam pengelolaan dana desa juga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas di daerah," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat.

Ganjar juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyederhanakan sistem laporan keuangan desa.

"Para kades mengaku pusing mikirin itu sehingga perlu didorong untuk gunakan Sikudes," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyarankan ada sanksi tegas bagi kepala desa atau aparat desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan maupun penggunaan dana desa.

"Penggunaannya mesti diatur dan kalau perlu diberi sanksi, jika penggunaannya tidak sesuai, tidak akan mendapatkan (anggaran) untuk besok," katanya.

Ganjar mewanti-wanti kepala desa agar selalu berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan dana desa supaya tidak terjerat hukum.

"Di Jateng jangan sampai terjadi peristiwa seperti di Pamekasan, Madura, kepala desa ditangkap karena menyelewengkan dana desa," ujarnya.

Pengelolaan dan penggunaan dana desa, kata Ganjar, harus secara transparan serta bertanggung jawab.

Ganjar mengapresiasi kepala desa yang menempelkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di balai desa sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi anggaran.